

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

PORTOFOLIO

(Disusun untuk Memenuhi Tugas Terstruktur dan Melengkapi nilai Mata Kuliah
Akuntansi Sektor Publik)

Dosen pengampu :

Dr. Pujiati, S. Pd., M. Pd.



Disusun Oleh:

Kelompok 7

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Yogi Rohani | 2313031031 |
| 2. Dyah Wulan Handayani | 2313031033 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ANALISIS 2 JURNAL INTERNASIONAL

Jurnal Internasional 1

Judul	:	<i>Public Service Pricing and Social Equity</i>
Penulis	:	Robinson, M., & Brumby, J.
Volume	:	40
No	:	1
Tahun Terbit	:	2020

Penelitian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya penerapan *full cost recovery* untuk menjamin keberlanjutan layanan utilitas publik. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan menutup biaya operasional akan berdampak pada penurunan kualitas layanan. Namun demikian, penulis menegaskan bahwa penerapan *cost recovery* harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik masyarakat. Dalam konteks akuntansi sektor publik, artikel ini memperkuat peran informasi biaya sebagai dasar penetapan tarif pelayanan publik.

Jurnal Internasional 2

Judul	:	<i>Cost Recovery and Sustainability in Public Utilities</i>
Penulis	:	Torres, L., & Pina, V.
Volume	:	Vol. 32 No. 4
Tahun Terbit	:	2019

Penelitian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya penerapan *full cost recovery* untuk menjamin keberlanjutan layanan utilitas publik. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan menutup biaya operasional akan berdampak pada penurunan kualitas layanan. Namun demikian, penulis menegaskan bahwa penerapan *cost recovery* harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik masyarakat. Dalam konteks akuntansi sektor publik, artikel ini memperkuat peran informasi biaya sebagai dasar penetapan tarif pelayanan publik.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Laporan Keuangan dan Kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2024

Berdasarkan dokumen Peraturan Bupati Mesuji tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, analisis laporan keuangan sektor publik Kabupaten Mesuji menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih berada pada kerangka perencanaan fiskal yang terkontrol dan patuh terhadap regulasi. Dokumen ini mencerminkan aspek perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, yang merupakan bagian penting dari sistem akuntansi sektor publik meskipun belum menggambarkan realisasi kinerja keuangan secara aktual. Total pendapatan daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp1.023.219.549.105, sementara belanja daerah mencapai Rp1.085.876.883.552. Kondisi ini menunjukkan adanya defisit anggaran yang secara sengaja direncanakan, yaitu sebesar selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp62.657.334.447, sehingga setelah pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) ditetapkan sebesar nol. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip pengelolaan anggaran yang terencana, di mana defisit tidak menunjukkan ketidakmampuan fiskal, melainkan strategi pembiayaan yang telah diperhitungkan sebelumnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tidak adanya perubahan nominal anggaran pada Perubahan Kedua APBD mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih menekankan penyesuaian administratif dan teknis dibandingkan perubahan kebijakan fiskal secara substansial. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama untuk menjaga stabilitas fiskal selama tahun anggaran berjalan. Dari sisi akuntabilitas, penyusunan penjabaran APBD ini telah mengacu pada berbagai regulasi utama seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Kabupaten Mesuji telah dibangun sesuai dengan prinsip legalitas dan transparansi.

Selain itu, struktur anggaran yang dirinci dalam berbagai lampiran menunjukkan bahwa alokasi belanja diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Dalam konteks akuntansi sektor publik, APBD berfungsi tidak hanya sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, karena dokumen ini masih berada pada tahap penjabaran anggaran, analisis kinerja keuangan secara menyeluruh belum dapat dilakukan tanpa membandingkannya dengan Laporan Realisasi Anggaran dan laporan keuangan daerah lainnya. Secara keseluruhan, laporan keuangan sektor publik Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2024 dari sisi perencanaan menunjukkan pengelolaan fiskal yang patuh regulasi, terstruktur, dan akuntabel, meskipun evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran baru dapat dilakukan secara komprehensif setelah tersedia data realisasi dan laporan kinerja pemerintah daerah.

Sumber:

[Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2024 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji](#)

Rincian/Description	Satuan/Unit	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	orang/people	229.772	232.685	237.935
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	1,003	0,990	1,600
Angka Kelahiran Total-AKT ¹ /Total Fertility Rate-TFR ¹	anak/child			
Angka Kematian Bayi-AKB (per 1000 kelahiran hidup) ¹	bayi			
Infant Mortality Rate-IMR (per 1000 life births) ¹	infant			
Angka Harapan Hidup ¹ -e ₀ /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	73,40	73,56	73,71
Angka Melek Huruf Usia 15+ /Literacy Rate Aged 15+	%	96,96	95,25	94,90
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ²	%	69,21	70,45	70,15
Labour Force Participation Rate-LFPR ²				
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ²	%	3,42	3,22	2,46
Unemployment Rate-UR ²				
Penduduk Miskin ³ /Poor People ³	orang/people	15.240	13.880	13.710
Persentase Penduduk Miskin ³	%	7,54	6,84	6,73
Percentage of Poor People ³				
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁴	—	66,24	67,12	67,79
Human Development Index ⁴				
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁵	milliar rupiah	10 878,96	11 952,99	12 948,55
Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ⁵	billions rupiahs			
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁶ /Economic Growth ⁶	%	2,84	3,49	4,06
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	juta rupiah			
Per Capita of GRDP at Current Price	million rupiahs			
Inflasi/Inflation (y-o-y)	%	-	-	-

Rincian/Description	Satuan/Unit	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	orang/people	229.772	232.685	237.935
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	1,003	0,990	1,600
Angka Kelahiran Total-AKT ¹ /Total Fertility Rate-TFR ¹	anak/child			
Angka Kematian Bayi-AKB (per 1000 kelahiran hidup) ¹ Infant Mortality Rate-IMR (per 1000 life births) ¹	bayi infant			
Angka Harapan Hidup ^{1-e} /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	73,40	73,56	73,71
Angka Melek Huruf Usia 15+ /Literacy Rate Aged 15+	%	96,96	95,25	94,90
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ² Labour Force Participation Rate-LFPR ²	%	69,21	70,45	70,15
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ² Unemployment Rate-UR ²	%	3,42	3,22	2,46
Penduduk Miskin ³ /Poor People ³	orang/people	15.240	13.880	13.710
Persentase Penduduk Miskin ³ Percentage of Poor People ³	%	7,54	6,84	6,73
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁴ Human Development Index ⁴	—	66,24	67,12	67,79
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁵ Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ⁵	milliar rupiah billions rupiahs	10 878,96	11 952,99	12 948,55
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁶ /Economic Growth ⁶	%	2,84	3,49	4,06
PDRB Per Kapita Harga Berlaku Per Capita of GRDP at Current Price	juta rupiah million rupiahs			
Inflasi/Inflation (y-o-y)	%	-	-	-

ANALISIS 3 JURNAL NASIONAL

1. A. IDENTITAS JURNAL

Judul Jurnal : Analisis Penetapan Tarif Pelayanan Publik pada BUMD Air Minum

Tahun Terbit 2022

Nama Penulis : Sari, D., & Nugroho, A.

Tanggal di Akses : 17 Desember, 2025

B. DESKRIPSI JURNAL

Jurnal ini menganalisis penetapan tarif air minum berbasis *full cost recovery* dan subsidi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa subsidi, tarif air berpotensi tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan tarif harus dirancang secara bertingkat.

Temuan jurnal ini mendukung konsep *charging for service* yang berkeadilan. Akuntansi biaya menjadi dasar utama dalam menentukan tarif, namun keputusan akhir tetap bersifat politis dan sosial. Hal ini menunjukkan perbedaan mendasar antara sektor publik dan sektor swasta.

2. A. IDENTITAS JURNAL

Judul : Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik Dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penulis : Bambang Pamungkas

Tahun terbit 2012

Nama Jurnal : Jurnal Ilmiah Ranggagading

Sumber Rujukan : (Pamungkas, 2012)

Tanggal akses : 18 November 2024

B. DESKRIPSI JURNAL

Dalam penelitian dapat dikutip bahwa, langkah strategis yang perlu dan harus

dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu iklim pemerintahan yang baik (good governance), yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Ada tiga pilar yang dimaksud yaitu: (1) Transparansi; (2) Partisipasi; dan (3) Akuntabilitas.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Instrumen penelitian yang digunakan dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan pengujian baik mengenai validitasnya (validity), maupun keterandalannya (reliability). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh langsung dari kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 0.214, dengan sig t kurang dari 5%, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas peraturan perundangan terhadap laporan keuangan pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa pada sektor pemerintah, lingkungan hukum memang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Suatu laporan keuangan akan berkualitas bilamana, laporan keuangan tersebut dapat diaudit dan hasil auditnya menunjukkan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Kualitas laporan keuangan yang dapat dan telah diaudit akan dapat meningkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain kondisi yang berkaitan dengan masalah akuntansi, laporan keuangan yang disajikan oleh instansi pemerintah pada dasarnya merupakan kumpulan dari laporan kegiatan proyek ataupun laporan kegiatan rutin, sehingga pemeriksaan yang selama ini dilakukan adalah lebih banyak kepada pemeriksaan ketaatan dan bersifat parsial. Penerapan akuntansi sektor publik, memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran.

Sumber:

Pamungkas, B. (2012). Pengaruh penerapan akuntansi publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen Rangagading*, 12(1), 001-010.

3. B. IDENTITAS JURNAL

Judul Jurnal : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Tahun Terbit 2008

Nama Penulis : Purwaniati Nugraheni Imam Subaweh

Tanggal di Akses : 18 November 2024

Jurnal(Vol&Halaman): Jurnal Ekonomi Bisnis (Vol.13 Hal.48-58)

B. DESKRIPSI JURNAL

Prinsip pengelolaan yang baik merupakan prinsip pokok yang harus berlaku diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pengelolaan yang baik perlu penguatan sistem dan lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar tersebut, sesuai dengan amanat pasal 23 C UUD 1945 tentang Keuangan Negara perlu dijabarkan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD ke dalam asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas tahunan, universalitas, kesatuan, dan asas spesialisasi. Selain itu ditetapkan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Bentuk konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan dan struktur laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sesuai amanat UU No.17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dalam penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional, dan peningkatan kualitas laporan keuangan Itjen Depdiknas Tahun 2007 dan 2008 dibandingkan dengan laporan

keuangan Tahun 2006. Pengaruh Pengetahuan Pengelola UAPPA EI dan UAPPB terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. Kualitas laporan keuangan telah mengalami peningkatan setelah penerapan SAP, namun peningkatan tersebut belum optimal karena belum didukung oleh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB yang memadai. Hal ini terlihat dari jumlah personil yang menangani laporan keuangan belum memenuhi kebutuhan, kemampuan personil belum sesuai dengan kebutuhan, dan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para personil tersebut belum memadai dalam melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan SAP. Peningkatan kualitas personil telah dilaksanakan antara lain dengan mengikuti sertakan pengelola laporan keuangan dalam sosialisasi atau pendidikan dan pelatihan mengenai SAP dan aplikasinya sesuai dengan proporsidan tanggung jawabnya.

Sumber:

Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2008). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 13(1).

ANALISIS 3 ARTIKEL BERITA

Artikel 1

Persepsi Akuntansi Sektor Publik Versus Akuntansi Pemerintah

Artikel ini membahas perbedaan persepsi antara akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Selama ini, akuntansi pemerintahan sering dipandang sebagai pengganti akuntansi sektor publik, padahal keduanya memiliki cakupan yang berbeda. Akuntansi sektor publik mencakup organisasi non-profit, yayasan, partai politik, tempat ibadah, hingga sektor kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, akuntansi pemerintahan lebih terbatas pada pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun RAPBN/RAPBD. Perbedaan ini penting karena mencerminkan kebutuhan pengelolaan yang lebih luas pada sektor publik di luar lingkup pemerintahan.

Dalam praktiknya, peran sektor publik di Indonesia sangat signifikan sebagai tulang punggung perekonomian, berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat yang lebih menitikberatkan peran sektor swasta. Artikel ini juga mengkritik sistem pendidikan akuntansi di Indonesia yang lebih berorientasi pada sistem AS, sehingga pembahasan akuntansi sektor publik sering kali tereduksi menjadi akuntansi pemerintahan saja. Hal ini berdampak pada kurangnya pengaturan dan pengajaran teknik akuntansi yang relevan untuk organisasi sektor publik yang lebih kompleks di luar pemerintah. Oleh karena itu, pembaruan dalam sistem pendidikan dan praktik akuntansi sektor publik menjadi kebutuhan mendesak.

Selain itu, artikel ini menyoroti perkembangan akuntansi sektor publik di negara lain seperti Inggris, yang telah menerapkan standar dan praktik yang lebih maju untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi sektor publik. Misalnya, Inggris telah memprioritaskan pengukuran kinerja berbasis hasil dan efisiensi anggaran sejak 1960-an. Sementara itu, di Indonesia, implementasi reformasi akuntansi sektor publik baru dimulai pada era reformasi, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pengurangan korupsi. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini masih menghadapi banyak

tantangan, seperti dominasi pengaruh politik dan lemahnya manajemen keuangan publik.

Kesimpulannya, akuntansi sektor publik memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana publik yang transparan dan akuntabel. Pengembangan disiplin ini harus mencakup teknik-teknik akuntansi yang relevan, standar pelaporan yang konsisten, serta fokus pada efisiensi dan efektivitas. Reformasi dalam pendidikan dan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia perlu terus dilakukan agar dapat menjawab tuntutan masyarakat terhadap tata kelola yang baik dan transparan, sesuai dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi.

Sumber: <https://media.neliti.com/media/publications/71982-ID-pengaruh-penerapan:akuntansi-sektorpubl.pdf>

Artikel 2

Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia

Artikel ini membahas perlakuan akuntansi sektor publik di desa-desa Indonesia dengan fokus pada kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan analisis keuangan desa. Dalam konteks implementasi Undang-Undang Desa, setiap desa di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi entitas mandiri dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Namun, desa-desa masih menghadapi banyak tantangan, seperti kompleksitas aturan, keterbatasan pengalaman aparatur desa, dan rendahnya pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual.

Salah satu masalah utama adalah ketergantungan desa pada transfer pendapatan dari pemerintah pusat dan daerah, yang sering kali tidak diiringi dengan peningkatan belanja modal yang produktif. Analisis pada APB Desa menunjukkan adanya disparitas dalam pengelolaan keuangan di antara desa-desa. Desa yang lebih inovatif seperti Desa A, misalnya, mampu meningkatkan belanja modal hingga 62,33%, sementara desa lain hanya mengalokasikan 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya investasi dana cadangan dan pengelolaan kas yang lebih produktif. Desa dapat memanfaatkan dana yang menganggur untuk investasi seperti deposito, obligasi, atau bahkan saham guna meningkatkan pendapatan. Namun, rendahnya keberanian aparatur desa dalam mengambil risiko investasi mencerminkan kurangnya jiwa kewirausahaan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Kesimpulannya, untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi keuangan desa, diperlukan regulasi teknis yang terpadu, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan budaya kompetitif antar desa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong desa menjadi entitas yang mandiri dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan transparan.

Sumber: <https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/download/681/601>

Artikel 3

Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Pemerintahan Desa

Artikel ini menganalisis implementasi akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan pemerintahan Desa Gendingan. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi prosedur pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan di Desa Gendingan telah sesuai dengan peraturan, dan sistem informasi berbasis desa seperti SISKEUDES membantu memperbaiki kualitas penyusunan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam menjalankan akuntansi sektor publik yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan APBDes di Desa Gendingan dimulai dengan perencanaan melalui RKPDesa, yang melibatkan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Proses ini dilanjutkan dengan penyusunan peraturan desa yang melibatkan sekretaris desa, kepala desa, dan BPD hingga mendapatkan evaluasi dari bupati. Prosedur ini telah memenuhi ketentuan regulasi dan menghasilkan alokasi anggaran yang

proporsional, yaitu 70% untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat, serta 30% untuk tunjangan aparatur desa.

Dalam penyajian laporan keuangan, Desa Gendingan telah menggunakan metode berbasis akrual yang memungkinkan transparansi lebih baik. Laporan Realisasi Anggaran disusun setahun sekali dan mencakup elemen pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan standar akuntansi pemerintah dan menjadi indikator komitmen desa dalam pengelolaan dana yang efektif. SISKEUDES turut mendukung pelaporan yang lebih terorganisir, menggantikan metode manual yang cenderung rentan terhadap kesalahan.

Kesimpulannya, implementasi akuntansi sektor publik di Desa Gendingan sudah berjalan baik dengan dukungan sistem dan regulasi yang memadai. Pemerintah desa telah berhasil mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menciptakan kemakmuran masyarakatnya. Namun, saran diberikan untuk penelitian lebih lanjut mengenai tahapan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBDes.

Sumber: <https://journal.unita.ac.id/index.php/jamanta/article/download/481/390/>